

## Mobilisasi Oleh Elit Tradisional Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Kerinci

**Santri Utami Pajri**

Universitas Andalas Padang

**Indah Adi Putri**

Universitas Andalas Padang

**Zainal Arifin**

Universitas Andalas Padang

Korespondensi penulis : [Santripajri27@gmail.com](mailto:Santripajri27@gmail.com)

**ABSTRACT.** Elections are held periodically, namely once every five years, with the aim of a constitutional change of power as regulated in the 1945 Constitution (UUD 1945). General elections are held in the form of presidential elections, regional head elections and legislative elections. At this time political parties are no longer the only force in political contestation. Elections that take place at the local election level still often encounter interference from elites, especially traditional elites, such as the regional elections that occurred in Kerinci Regency, where one of the elite's roles is as a force in mobilizing the masses. Many candidates use traditional culture to get more supporters in the election. Through its mass power, it can be used as an effective political machine in political contestation. This confirms that political mobilization is the key to winning election contestations. In analyzing mass mobilization by traditional elites, researchers use mobilization theory according to Stefano Bartolini and elite theory from Pareto and Mosca because mobilization in politics is a series of processes carried out by traditional elites in recruiting participants to obtain special support in an election. This research uses a qualitative approach with an instrumental case study method. The research results show that mass mobilization was commanded by traditional elites, such as the Depati and Ninik Mamak of Kerinci Regency, who directed and ordered the community and their nephews to choose certain agreed candidate pairs. The order was issued by Depati Ninik Mamak in a joint meeting to decide on support for candidate pair Adirozal-Ami Taher, so that the results of the meeting resulted in a joint agreement to win the pair Adirozal-Ami Taher.

**Keywords:** Traditional Elite, Mass Mobilization, Pilkada

**ABSTRAK.** Pemilu yang dilakukan secara berkala yakni lima tahun sekali dengan tujuan sebagai pergantian kekuasaan secara konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemilihan umum yang dilakukan berupa pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Pada saat ini partai politik bukan lagi yang menjadi kekuatan satu-satunya dalam kontestasi politik. Pemilu yang berlangsung pada tingkat pilkada masih kerap ditemui campur tangan elit terutama elit tradisional seperti pilkada yang terjadi pada Kabupaten Kerinci, di mana peran elit salah satunya sebagai kekuatan dalam memobilisasi massa. Banyak kandidat yang menggunakan budaya tradisional untuk bisa mendapatkan lebih banyak pendukung dalam pemilu. Melalui kekuatan massa yang dimilikinya ini dapat digunakan sebagai mesin-mesin politik yang efektif dalam kontestasi politik. Hal inilah yang menegaskan bahwa mobilisasi politik merupakan kunci dari memenangkan kontestasi pemilu. Dalam menganalisis mobilisasi massa oleh elit tradisional peneliti menggunakan teori mobilisasi menurut Stefano Bartolini dan teori elit dari Pareto dan Mosca karena mobilisasi dalam politik adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh elit tradisional dalam merekrut partisipan guna mendapat dukungan khusus dalam suatu pemilihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi massa dikomandoi oleh elit tradisional, seperti Depati dan Ninik Mamak Kabupaten Kerinci yang mengarahkan serta memerintahkan masyarakat dan anak kemenakan untuk memilih paslon tertentu yang disepakati. Perintah itu dikeluarkan oleh Depati Ninik Mamak didalam rapat bersama untuk memutuskan dukungan paslon Adirozal-Ami Taher, sehingga hasil rapat itu menghasilkan sebuah kesepakatan bersama untuk memenangkan pasangan Adirozal-Ami Taher.

**Kata kunci:** Elit Tradisional, Mobilisasi Massa, Pilkada

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara mengadakan pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali untuk memperbarui ataupun mengganti kepemimpinannya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dan juga untuk membantu mewujudkan tujuan yang digariskan dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD). Memilih bukan sekedar kewajiban warga negara, melainkan kesempatan bagi rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjukkan dukungannya terhadap lembaga dan kebijakan negara (NKRI). Demokrasi juga bagian dari pendidikan politik mencakup pembelajaran bagaimana menyelenggarakan pemilu secara adil dan sah sehingga warga negara bisa bergotong royong demi kemajuan bangsa dan negara.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus dijalankan dengan baik oleh setiap warga negaranya, dengan begitu konsep dari sistem demokrasi dapat terwujud dengan baik. Ibnu Tricahyono memberikan definisi pemilu yang konseptual dan filosofis. Menurut Ibnu, pemilu termasuk cara rakyat untuk menyampaikan kehendak dan cita-citanya sekaligus ikut membentuk suatu pemerintahan yang sah. Pemilu juga membantu warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil rakyat dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis.

Pelaksanaan pemilu pada berbagai tingkatan memiliki perbedaan pada pemilihan presiden, pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota yakni memiliki perbedaan dan kompleksitas dari segi luas cakupan wilayah pemilihan. Pemilihan bupati memiliki skala yang kecil sehingga lebih dekat kaitannya dengan khalayak (pemilih) ataupun masyarakat sehingga bisa dilihat tingkat partisipasi pemilih saat berlangsungnya pilkada mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan ataupun malah cenderung menurun, namun penyelenggaraan pilkada bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik rakyat tidak hanya semata-mata untuk kepentingan politik saja tetapi juga memberikan kesadaran masyarakat saat memakai hak politiknya.

Pada saat ini partai politik bukan lagi yang menjadi kekuatan satu-satunya dalam kontestasi politik. Kekuatan non partai pun terlibat dalam aktivitas mobilisasi masa untuk memenangkan pasangan calon. Kekuatan non partai tersebut bisa juga dari ormas agama, ormas etnis, ormas kepemudaan dan juga kebebasan berserikat non partai politik. Instrumen mobilisasi politik lain yang dapat dimanfaatkan partai politik adalah fungsi kekerabatan. Kekerabatan merupakan bentuk relasi sosial yang didasarkan aspek keturunan. Pergeseran fungsi kekerabatan yang berbasis keturunan makin transparan pada proses elektoral lokal. Fungsi kekerabatan dapat dimanfaatkan partai politik atau calon sebagai instrumen mobilisasi politik untuk kepentingan pencalonan. Konsep-konsep mengenai fungsi kekerabatan perlu

ditinjau secara kritis seiring munculnya motivasi-motivasi kekuasaan politik para elit atau calon dalam menggunakan kekerabatan sebagai instrumen mobilisasi politik mereka. Fungsi kekerabatan telah bergeser dari sekedar kekuatan solidaritas sosiokultural menjadi fungsi representasi instrumen mobilisasi politik elit atau calon.

Hal ini bisa dilihat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mana banyak kandidat yang menggunakan budaya tradisional untuk bisa mendapatkan lebih banyak pendukung dalam pemilu, seperti memanfaatkan sistem kekerabatan pada pemilu.

Para calon tersebut juga mengandalkan kegiatan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan tidak hanya melalui atau menggunakan partai politik namun juga melalui instrumen mobilisasi politik non partai politik yakni elit tradisional. Menurut Pareto dan Mosca salah satu kelompok elit yang tidak memerintah adalah elit tradisional. Kelompok ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu elit agama, pewaris budaya atau adat istiadat dan golongan bangsawan yang memiliki daulat atau wilayah. Keberadaan elit tradisional dalam negara berkembang termasuk di Indonesia memiliki peranan penting dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Elit tradisional dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada diasumsikan menjadi penyebab partisipasi masyarakat di Kabupaten Kerinci cukup tinggi. Keberhasilan partisipasi politik masyarakat ini kerap menjadi sorotan pilkada sebab berkaitan dengan seberapa banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suara mereka.

Peranan elit tradisional juga merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik seperti yang dikatakan oleh Suzanne Keller sebagaimana dikutip oleh Maurice Duverger, melihat peranan elit tradisional sebagai elit politik yaitu orang atau golongan orang dengan pengaruh yang dimiliki dalam proses pengambilan keputusan politik. Elit lokal merupakan individu atau orang yang mengendalikan peran dalam keputusan-keputusan politik di level lokal.

Dalam dinamika pilkada Kabupaten Kerinci secara tersirat juga merupakan persaingan antar kaum Depati dan Ninik mamak dalam mengusung anak kemenakan untuk dapat memenangkan pilkada. Tentu dengan harapan pembangunan wilayah dan karir anak kemenakan dipemerintahan akan lebih berpeluang untuk berkembang. Apabila kaum elit tradisional tidak menyikapi hal tersebut maka akan sangat menguntungkan calon lain yang bukan dari daerah atau kalbu yang sama, maka untuk memenangkan kandidat harus kaum elit tradisional yang berperan secara aktif dalam memobilisasi anak kemenakan untuk menentukan pilihan sesuai dengan arahan kaum Depati dan Ninik Mamak.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Mobilisasi Politik**

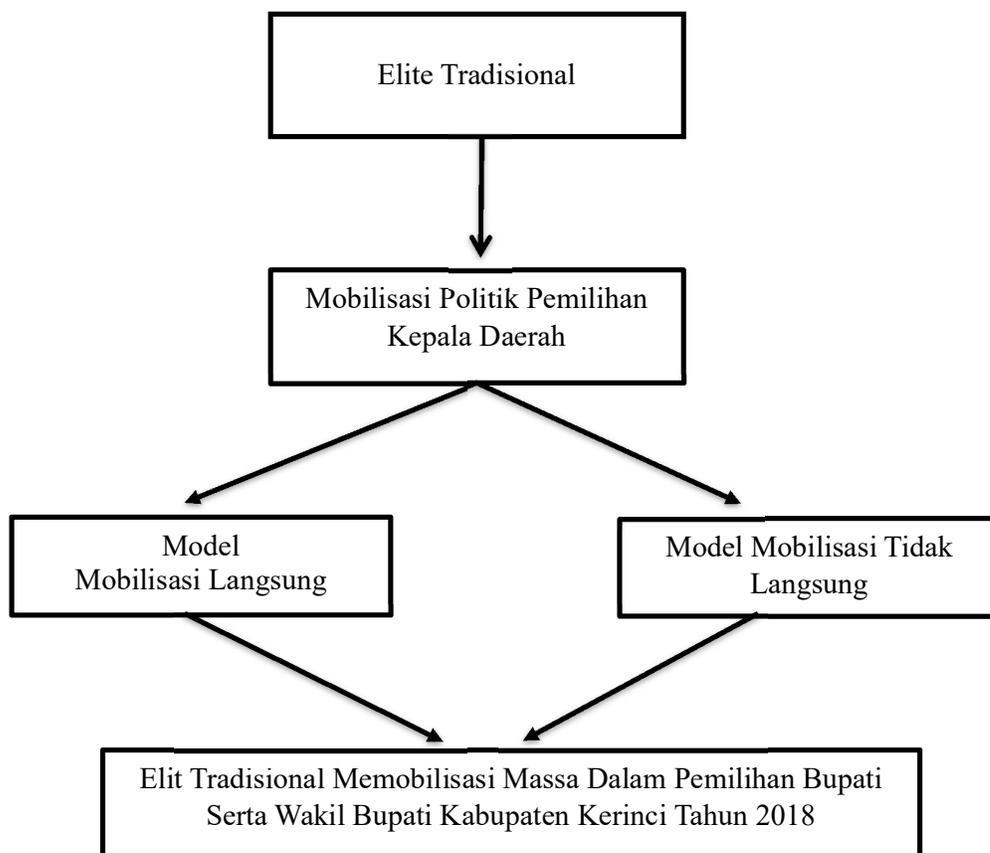
Mobilisasi menurut Stefano Bartolini dalam bukunya *The Political Mobilization of the European Left* terdapat kutipan bahwa mobilisasi merupakan keanekaragaman proses keterlibatan masyarakat dalam suatu usaha rekrutmen masa dengan tujuan tertentu, dan mobilisasi secara struktural terjadi pada masa industrialisasi dan modernisasi. Mobilisasi dalam politik menurut Stefano adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, organisasi maupun partai dalam merekrut partisipan guna mendapat dukungan khusus dalam suatu pemilihan.

### **Teori Elit**

Pareto menjelaskan bahwa mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik, merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Golongan minoritas yang memerintah itu yang di sebut elit, golongan ini memiliki akses di pusat kekuasaan. Pareto menggarisbawahi bahwasanya elit berangkat dari kelas yang sama, yakni individu-individu kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu.

### **Elit Tradisional**

Menurut Pareto dan Mosca salah satu kelompok elit yang tidak memerintah adalah elit tradisional. Kelompok ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu elit agama, pewaris budaya atau adat istiadat dan golongan bangsawan yang memiliki wilayah. Keberadaan elit lokal dalam negara berkembang termasuk di Indonesia memiliki peranan penting dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Suzanne Keller sebagaimana dikutip oleh Maurice Duverger, melihat peranan elit tradisional sebagai elit politik, yaitu orang atau golongan orang dengan pengaruh yang di miliki dalam proses pengambilan keputusan politik. Sebagai elit non pemerintah kelompok ini meliputi elit adat seperti pemuka adat. Elit ini hanya memiliki modal sosial untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat akar rumput.

**Kerangka Pikir****Bagan 1. Kerangka Pikir**

*Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2023*

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian kualitatif yakni metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang melekat pada berbagai orang dan kelompok terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Creswell menguraikan langkah-langkah penting yang terlibat pada penelitian kualitatif termasuk perumusan pertanyaan dan prosedur penelitian, pengumpulan data dari partisipan, analisis induktif data tersebut dari tema yang lebih spesifik ke tema yang lebih umum. Untuk mulai mendapatkan pengetahuan atau data, para pemikir induktif pertama-tama melihat dari fenomena di sekitar mereka dalam bentuk fakta yang nyata dan bisa diamati. Agar jenis penelitian ini berhasil peneliti perlu mengambil sikap induktif, menekankan interpretasi peserta, dan mampu mengkomunikasikan masalah secara efektif. Penelitian kualitatif juga melihat secara utuh ataupun holistik. Sehingga metode kualitatif relevan dengan fokus yang ingin peneliti kaji guna secara mendalam melihat elit tradisional memobilisasi massa dalam pemilihan bupati serta wakil bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus instrumental guna menjelaskan fenomena penelitian yang diangkat yaitu mobilisasi massa oleh elit tradisional pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Kerinci. Secara umum, studi kasus instrumental yakni strategi yang cocok untuk menjelaskan pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa yang diteliti dengan fokus pada fenomena kontemporer ataupun masa kini di dalam kehidupan nyata.

## **TEMUAN DAN ANALISIS**

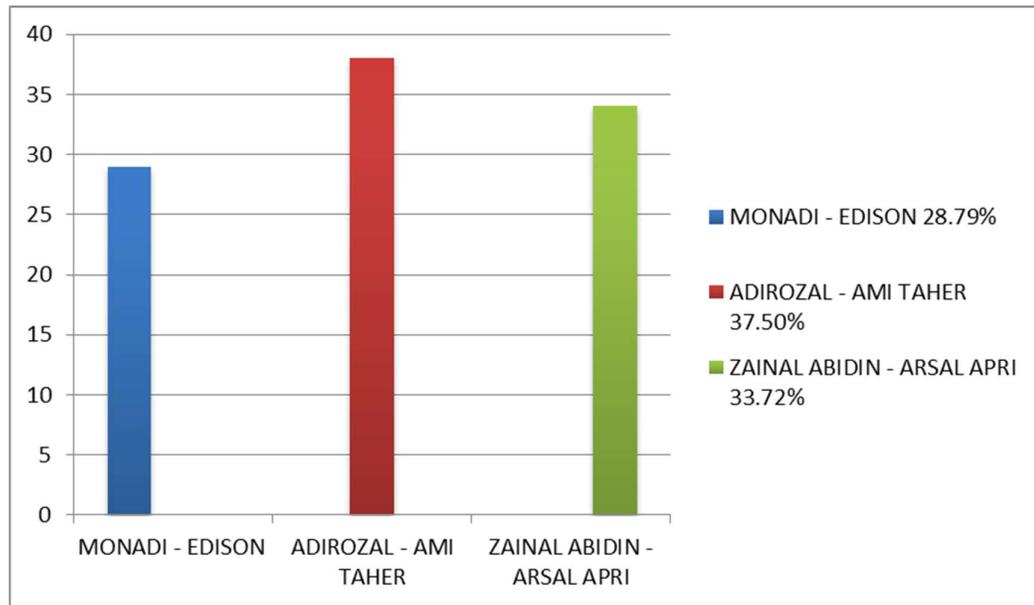
### **1. Proses Pemilihan Bupati Serta Wakil Bupati Di Kabupaten Kerinci Tahun 2018**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah proses pemilu untuk mengisi jabatan kepala daerah baik gubernur (untuk tingkat provinsi), maupun bupati (untuk tingkat kabupaten). Pada konteks ini yang dimaksud pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah Kabupaten Kerinci, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi. Secara keseluruhan ada tiga pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2018 untuk Periode Tahun 2019-2024.

Pada Pilkada Kerinci 2018 partisipasi pemilih mencapai 151.385 dari 212.458 pemilih terdaftar yang artinya ada 61.073 pemilih tidak berpartisipasi. Secara persentase ada 97,94% suara yang sah dan 2,06% suara tidak sah.

Menurut Ketua KPU tahap persiapan 1. Perencanaan program dan anggaran 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 5. Pembentukan panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci diselenggarakan pada tanggal 27 juni 2018. Menurut Ketua Bawaslu secara umum pilkada tahun 2018 Kabupaten Kerinci berjalan sesuai dengan aturan aman dan tertib. Pilkada Kerinci 2018 dimenangkan oleh Paslon No. 2 Adirozal-Ami Taher. Berikut adalah perolehan suara bisa dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1**

**Penetapan Hasil Pada Pilkada di Kabupaten Kerinci Tahun 2018**

*Sumber: Website KPU (2018) diambil pada Tahun 2023*



**Gambar 2**

**Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018**

*Sumber: Facebook Kerinci People diambil pada Tahun 2023*

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa pasangan Adirozal-Amitaher unggul di Kabupaten Kerinci, pasangan Adirozal-Amitaher berhasil memperoleh suara

sebanyak 55.597 dan berhasil mengalahkan Monadi-Edison dan Zainal Abidin-Arsal Apri. Pasangan nomor urut 1 unggul di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Siulak Mukai. Nomor urut 2 mendominasi di Kecamatan Kabupaten Kerinci bagian Mudik yaitu Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Siulak. Sedangkan nomor urut 3 mendominasi Kabupaten Kerinci bagian hilir yaitu Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Keliling Danau, dan Kecamatan Sitinjau Laut. Berdasarkan faktor sosiologis demografi masing-masing pasangan calon unggul di daerah asal mereka masing-masing.

## **2. Mobilisasi Oleh Elit tradisional Terhadap Pemilihan Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018**

Pergerakan elit tradisional dalam meningkatkan partisipasi pemilih, perlu memperhatikan pengaruh dari elit itu sendiri. Hal ini disadari bahwa elit dan pengaruh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena elit merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit sehingga memiliki pengaruh dalam lingkungan masyarakat.

Elit tradisional merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik. Begitu pula halnya dengan elit atau tokoh agama merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam bidang keagamaan.

Golongan elite tradisional secara adat masyarakat Kerinci dikelompokkan menjadi 4 golongan yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan generasi muda. Empat golongan pada masyarakat Kerinci tersebut biasa dikenal dengan istilah kaum empat jenis. Kaum empat jenis merupakan pengelompokan masyarakat yang saling satu dengan yang lainnya. Pertama, alim ulama berfungsi membimbing masyarakat agar dapat berperilaku sesuai tuntutan agama. Kedua, cerdik pandai sebagai orang yang pintar dan pandai berfungsi memberikan solusi ketika terdapat suatu masalah. Ketiga, generasi muda sebagai penerus para tetua-tetua adat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan mempertahankan serta melestarikan adat istiadat yang ada. Keempat, ninik mamak berfungsi membimbing, membina dan mengarahkan anak kemenakannya.

Elit tradisional memiliki peran didalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Salah satu kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan elit tradisional yaitu kegiatan politik, yang mana elit politik dijadikan sebagai jaringan komunikasi ketika hendak masuk ke masyarakat Tigo Luhah

Tanah Sekudung dan Tigo Luhah Semurup, dalam mengajak masyarakat berpartisipasi hingga membantu mempengaruhi hak suara anak kemenakannya.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh keterlibatan elit tradisional dalam pilkada dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat Kerinci yang menghormati tokoh-tokoh agama serta tokoh adat mereka. Elit tradisional dapat mempengaruhi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pilkada. Tetapi keterlibatan elit tradisional dalam pilkada bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Kemampuan elit tradisional dalam mendorong partisipasi politik warga masyarakat pada pilkada tidak lepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut. Jadi dari penjelasan di atas dapat diberi kesimpulan bahwasannya pemilihan kepala daerah selalu ditandai dengan adanya peran elit tradisional dalam menggerakkan masyarakat sehingga berdampak dalam meningkatnya partisipasi pemilih dalam pilkada. Kemudian dalam memobilisasi massa Depati Ninik Mamak melakukan musyawarah atau rapat terlebih dahulu guna menentukan pilihan dan setelah itu barulah disosialisasikan kepada masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Depati Ninik Mamak ikut terlibat dalam proses menggerakkan masyarakat untuk memilih dalam pilkada. Kemudian dalam memobilisasi massa Depati Ninik Mamak melakukan sosialisasi guna mengokohkan keyakinan dan menyatukan pemahaman dengan masyarakat. Proses mobilisasi yang dilakukan oleh elit tradisional dimulai dari perkumpulan Depati untuk melakukan musyawarah setelah itu baru menyerukan ke masyarakat atas keputusan yang telah ditetapkan oleh para elit tradisional berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh keterlibatan elit tradisional dalam pilkada dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang mana pada tahun 2013 jumlah partisipasi pemilih sebanyak 143.022 sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 151.385 partisipasi pemilih. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat Kerinci yang menghormati tokoh-tokoh agama serta tokoh adat mereka. Dapat dikatakan bahwa kenaikan tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 merupakan dampak dari keterlibatan elit tradisional dalam pilkada. Elit tradisional dapat mempengaruhi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pilkada.

## **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak pemerintah dapat selalu melibatkan elit tradisional dalam hal politik karena besarnya pengaruh yang diberikan oleh para elit tradisional terutama dalam hal politik. Para elit tradisional merupakan orang yang didahulukan selangkah oleh masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh dalam hal politik terutama dalam memobilisasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih mematuhi dan akan selalu menerima keberadaan elit tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan para elit tradisional merupakan orang yang dituakan, para elit tradisional ini juga akan mengawasi dan akan menjadi nenek yang akan menasehati masyarakat. Para elit tradisional ini juga akan menjadi mamak (paman) yang akan selalu membimbing masyarakat.

c. Bagi KPU

Diharapkan dengan adanya penelitian ini KPU dapat melibatkan elit tradisional dalam membantu memberikan informasi terkait penyelenggaraan sistem pemilihan dan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh masyarakat terkait pilkada sehingga dapat membantu kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bilal Tuhulel, Sri Yunanto. (2022). Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017. *Jurnal Politica*. Vol. 13 No. 2. Hal. 206
- Creswell, John W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Destrina Lumendek. (2018). Partisipasian Elit tradisional Masyarakat Pada Pemilu Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kabupaten Pulau Morotai Jaya Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Politico*, Vol 7, No 3.
- Febri Rahmat. (2020). Dukungan Politik Elit Adat Kecamatan Kuranji Kepada Irwan Prayitno-Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar tahun 2015. *Jurnal Demokrasi dan Politik tradisional*. Vol. 2 No. 1, April.
- Ibnu, S., Mukhadis, A Dan Dasna I.W. (2003). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Malang : Universitas Negeri Malang.
- Kris Nugroho. (2011). Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai Dalam Mobilisasi Politik Elektoral. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 24. No. 3. Hlm. 203
- Ida Bagus Nyoman Baskara Punia Manuaba, dkk. (2022). Strategi Mobilisasi Politik Tjokorda Gede Agung Melalui Pura Dadia Pada Pemilu 2019 Di Desa Nyanglan. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 1 No.1. Hlm. 2.
- Maurice Duverger. (2005). *Sosiologi Politik (terjemahan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 163.
- Meldy Dkk, (2021). *Membumikan Electoral Justice Dalam Pilkada*. Kpu Provinsi Sulawesi Utara.